



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 2



2025



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan PPN Ternate dalam kurun waktu sampai dengan triwulan 2 tahun 2025. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, realisasi program, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pengelolaan pelabuhan perikanan yang optimal, efisien, dan bertanggung jawab.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, pembelajaran, serta acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan sumber daya, dan pencapaian target kinerja di triwulan berikutnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerjasama, serta kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Ternate, 17 Juli 2025

Kepala Pelabuhan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kamarudin

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

110,10



Nilai PNBP 120%

1.753,68



Produksi Perikanan 92,92%

1.858,49



Tingkat kinerja 110,83%

96,42



Nilai Pengendalian Lingkungan 120%

90,11



Kapal Izin Daerah 98,43%

313



Pemenuhan Bekerja Awak kapal 120%

0,57^a



Rekomendasi Pengawasan 117,65

100



IP ASN

101,02%

82,84



Persentase RUP PBJ 120%

100



IKPA 115,56%

98,56



SKM 104,07%

92,10

Unit Kerja 0312030000 - PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE Tahun 2025 -



Capaian Kinerja IKU

	TW1	TW2	Nilai TW2	TW3	Nilai TW3	TW4
Skor Capaian	40,00 110,79 Q ₁	40,00 110,11 Q ₁	40,00 110,11 Q ₁	0,00	0,00	0,00
Skor Tertinggi	40,00 110,79 Q ₁	40,00 110,11 Q ₁	40,00 110,11 Q ₁	0,00	0,00	0,00

Warna	Keterangan
Merah	nilai 110 - 120
Biru	nilai 90 - <110
Kuning	nilai 70 - <90
Hijau	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Catatan:

1. Istimewa Nilai 100-120, diperoleh dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU)
2. Baik Nilai 90<110, diperoleh dari 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUGAS DAN FUNGSI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4. ISU STRATEGIS PPN TERNATE	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1. RENCAN STRATEGIS	5
2.2. PERJANJIAN KINERJA	6
2.3. RENCANA KERJA	7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
BAB IV. PENUTUP	50
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja PPN Ternate Tahun 2025	6
Tabel 2. Rencana Anggaran PPN Ternate Tahun 2025	7
Tabel 3. Capaian Kinerja PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025	9
Tabel 4. Jumlah Penerimaan PNBPD Berdasarkan Jenis Penerimaan di PPN Ternate Selama Bulan Januari-Maret 2025	13
Tabel 5. Capaian Indikator Penerimaan PNBPD Non SDA di PPN Ternate	13
Tabel 6. Ringkasan Capaian PNBPD Jenis Penerimaan Fungsional Triwulan 2 Tahun 2025	14
Tabel 7. Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate Bulan Januari – Juni 2025	16
Tabel 8. Capaian Indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate	16
Tabel 9. Capaian Indikator Tingkat Kinerja PPN Ternate	20
Tabel 10. Nilai Kinerja Operasional PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025	21
Tabel 11. Nilai Implementasi Selamatkan PPN Ternate yang telah dievaluasi Selama Bulan Januari-Maret 2025	24
Tabel 12. Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate	24
Tabel 13. Jumlah SKKP yang diterbitkan di PPN Sampai dengan Triwulan 2 2025.....	27
Tabel 14. Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	27
Tabel 15. Data Capaian Tingkat Pemenuhan persyaratan Bekerja Awak kapal Perikanan Triwulan 2 Tahun 2025	30
Tabel 16. Capaian Indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025	31
Tabel 17. Perbandingan Capaian Indikator Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	33
Tabel 18. Pembobotan Nilai Evaluasi AKIP	34
Tabel 19. Perbandingan Capaian IP ASN Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	36
Tabel 20. Data Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025	38
Tabel 21. Capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025	38
Tabel 22. Nilai IKPA PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025	42
Tabel 23. Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025.....	43
Tabel 24. Capaian Indikator Nilai Survei kepuasan Masyarakat lingkup PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025	47
Tabel 25. Alokasi Anggaran Kegiatan PPN Ternate Tahun 2025	49
Tabel 26. Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan 2 Tahun 2025	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Ternate	3
Gambar 2. Dashboard Kinerja PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025	8
Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Nilai PNBP Non SDA di PPN Ternate ..	15
Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate	17
Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate	26
Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Kapal perikanan izin Daerah di PPN Ternate	29
Gambar 7. Dashboard Aplikasi Sidak.kkp.go.id Triwulan 2 Tahun 2025	33
Gambar 8. Kegiatan yang dilakukan untuk Mendukung IKU IP ASN	37

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Nilai Kinerja Operasional PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025.....	19
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	54
Lampiran 2. Penghargaan yang diperoleh Selama Triwulan 2 Tahun 2025.....	55

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/Permen-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, PPN Ternate melakukan berbagai kegiatan yang akan membantu dan mengawal tugas dan fungsi PPN Ternate sehingga target kinerja dapat tercapai. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja PPN Ternate sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar PPN Ternate dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Acuan dalam penyusunan LKj PPN Ternate Tahun 2025 antara lain, yaitu:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Presiden No. 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMENKP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Kelautan dan Perikanan;

- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 7) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- 8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, dalam hal ini dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate menyelenggarakan fungsinya:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- 2) Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan log book penangkapan ikan;
- 5) Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
- 6) Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- 7) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 8) Pelaksanaan pembangunan pengembangan pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- 10) Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;

- 11) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- 12) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (cpib);
- 13) Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- 14) Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- 15) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

PPN Ternate merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan untuk struktur penugasan pada UPT Eselon III sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Ternate

Dalam struktur Penugasan pada Gambar di atas, akan berlaku beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

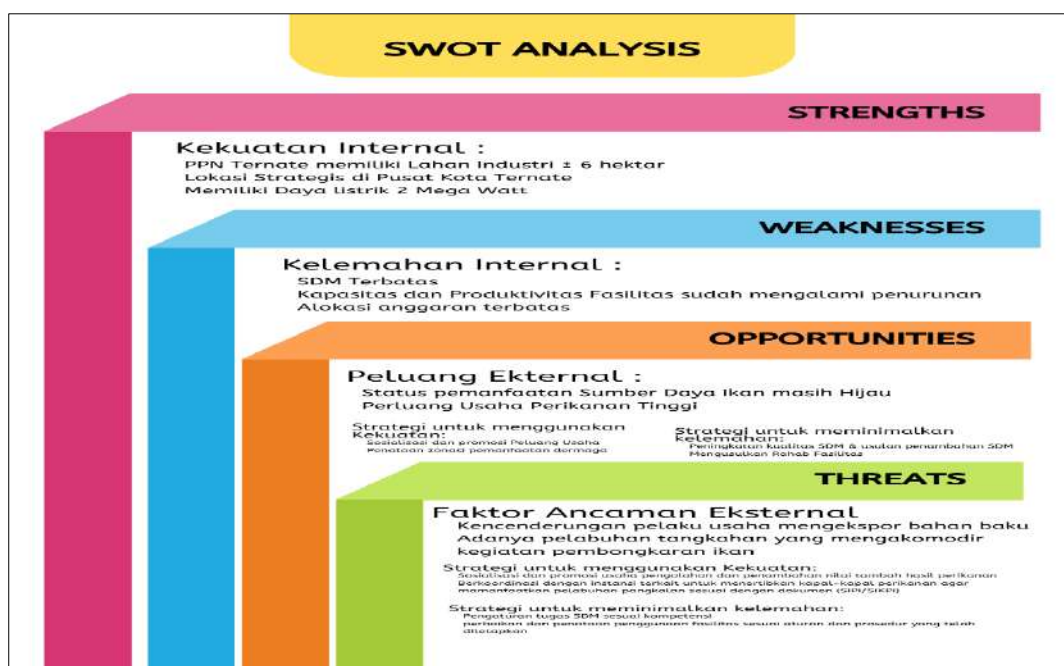
- a. Pejabat administrator menetapkan kinerja pejabat pengawas, Pejabat Fungsional, dan pelaksana;
- b. Pejabat administrator akan memberikan penilaian kinerja sekaligus memberikan Penugasan pada pejabat pengawas, Pejabat Fungsional, dan pelaksana; dan
- c. Pejabat administrator berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan Unit Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Administrator atau Kepala Pelabuhan membentuk 4 Tim Kerja sesuai dengan Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama PPN Ternate, didukung oleh pegawai 47 ASN, 16 Tenaga Kontrak, serta Tenaga Outsourcing.

1.4. ISU STRATEGIS PPN TERNATE

Pelaksanaan operasional di PPN Ternate dalam mendukung program perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi dalam konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasi ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah permusan alternatif arah kebijakan.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCAN STRATEGIS

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Visi dan Misi sesuai dengan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 uraian sebagai berikut:

VISI KKP				
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”				
MISI KKP				
Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:				
Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.		Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.	Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.	
MISI DJPT				
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
SASARAN KEGIATAN PPN TERNATE				
Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Ternate	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Ternate Meningkat	Pengelolaan PPN Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Ternate	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Ternate
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
IKU 1	IKU 2	KU 3, IKU 4, IKU 5, IKU 6, KU 7	IKU 8, IKU 9	IKM 10, IKM 11, IKM 12, IKM 13, IKM 14, IKM 15, IKM 16, IKM 17, IKM 18
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN				
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang disepakati Bersama oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU PPN Ternate pada Tahun 2025 untuk semua SK berjumlah 18 (delapan belas) IKU. Sebagai alat ukur SK yang telah ditetapkan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja PPN Ternate Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
1.	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	1.	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Rp. Juta)	2.294,76
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkatkan	2.	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Ton)	4.000
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3.	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	100
		4.	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	87
		5.	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (persen)	55
		6.	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen)	80
		7.	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	30,10
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	8.	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	368
		9.	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
Program Dukungan Manajemen				
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan	10.	Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Telah Dinilai WBK (Nilai)	75,5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	85
		12.	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	88
		13.	Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	87
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	76
		15.	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	81
		16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	92
		17.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	71,5
		18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	88,5

2.3. RENCANA KERJA

Dalam rangka mendukung visi dan misi serta pencapaian sasaran kegiatan, PPN Ternate didukung oleh anggaran kegiatan yang bersumber dari APBN tahun 2025, yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu:

Tabel 2. Rencana Anggaran PPN Ternate Tahun 2025

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Rp 1.137.701.000
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Rp 33.460.000
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Rp 11.483.975.000
Total Anggaran PPN Ternate Tahun 2025	Rp 12.655.136.000

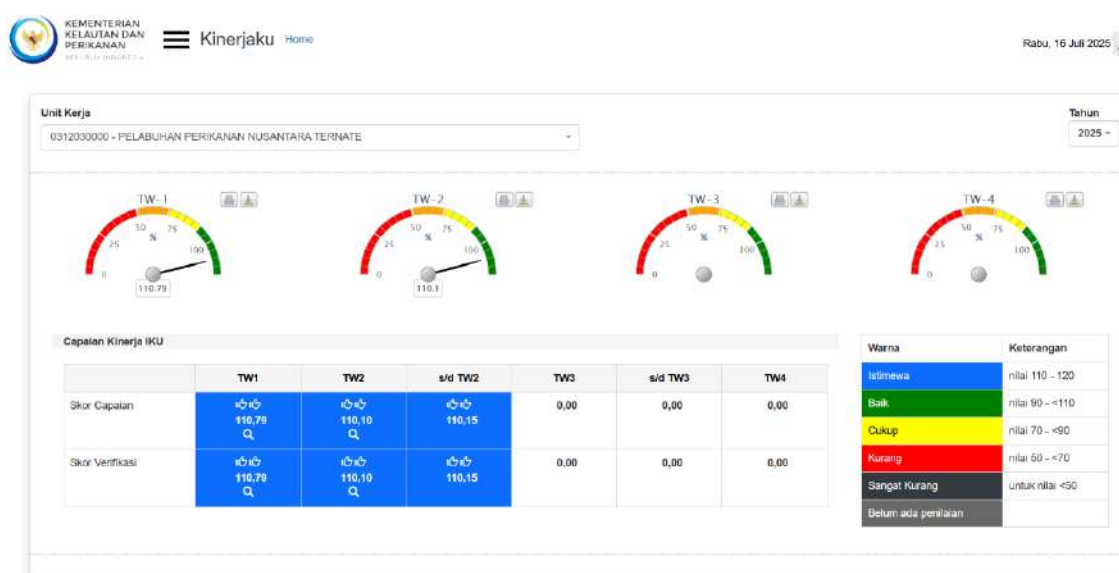
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) berpedoman pada Manual IKU agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa indikator capaiannya. Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 telah dilakukan berdasarkan hasil capaian data dukung yang diinput pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id untuk setiap indikator.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja di Triwulan 2 tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja periode pengukuran ada yang diukur triwulan, semester dan tahunan dengan formula perhitungan yang berbeda disetiap indikator.

Pada Triwulan 2 2025, PPN Ternate mengukur capaian kinerja berdasarkan 5 (lima) sasaran kegiatan dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan periode pengukuran triwulan, dengan perolehan Nilai Capaian Organisasi (NKO) 110,10% atau kategori Istimewa sebagaimana dashboard Capaian Kinerja pada aplikasi kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 2. Dashboard Kinerja PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi PPN Ternate. Berikut disajikan capaian setiap indikator kinerja yang telah dicapai pada Triwulan 2 tahun 2025.

Tabel 3. Capaian Kinerja PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025

Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan 2	Capaian Triwulan 2	%
Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				120,00
IKU 1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Rp. Juta)	2.294,76	1.147,38	1.753,68	120,00
Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat				92,92
IKU 2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Ton)	4.000,00	2.000,00	1.858,49	92,92
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab				114,95
IKU 3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	100,00			
IKU 4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	87,00	87,00	96,42	110,83
IKU 5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (persen)	55,00			
IKU 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen)	80,00			
IKU 7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan	30,10	30,10	90,11	120,00

Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan 2	Capaian Triwulan 2	%
Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)				
Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				111,37
IKU 8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	368,00	318	313	98,43
IKU 9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	0,26	0,57	120,00
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				111,73
IKM 10.Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	75,50			
IKM 11.Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	85,00	85,00	100,00	117,65
IKM 12.Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	88,00			
IKM 13.Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	87,00	82	82,84	101,02
IKM 14.Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	76,00	76,00	100,00	120,00
IKM 15.Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusnata Ternate (Persen)	81,00			
IKM 16.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	92,00	85	98,56	115,56

Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan 2	Capaian Triwulan 2	%
IKM 17.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	71,50			
IKM 18.Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	88,50	88,50	92,10	104,07

Sumber data: <https://kinerjaku.kkp.go.id/> (akun kinerjaku PPN Ternate)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hanya ada 11 (sebelas) indikator kinerja yang memiliki target dan capaian Triwulan 2 karena pengukurannya secara triwulan dan semester sedangkan yang tidak memiliki target dan capaian triwulan merupakan indikator yang pengukurannya dilakukan tahunan. Namun berdasarkan tabel di atas dari 11(sebelas) indikator kinerja di Triwulan 2 2025, hanya 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target triwulan, sedangkan 9 (sembilan) indikator telah melebihi capaian target triwulan. Untuk lebih jelas terkait Analisa Capaian Indikator kinerja Triwulan 2 2025 akan di bahas satu persatu sesuai dengan sasaran kegiatan masing-masing indikator kinerja.

3.2.1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran Kegiatan didukung oleh satu (1) Indikator Kinerja yaitu Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Ternate.

IKU 1 PENERIMAAN PNBP NON SDA DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan angka pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan

Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi). Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Formula perhitungan sebagai berikut :

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW I + TW II; Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV

Penerimaan PNBP di PPN Ternate bersumber dari 2 (dua) penerimaan yaitu:

- 1) Penerimaan Umum, yaitu penerimaan yang bersumber dari penerimaan sewa rumah dinas;
- 2) Penerimaan Fungsional, yaitu penerimaan dari jasa pelayanan yang dilaksanakan di PPN Ternate sebagai berikut:
 - Jasa penggunaan tanah/bangunan (biaya pengembangan dan pemeliharaan);
 - Jasa penggunaan tangki BBM;
 - Jasa Tempat Penumpukan Barang;
 - Jasa penggunaan ruang pendingin (ABF/Cold Storage)
 - Jasa Pengadaan es;
 - Jasa pengadaan air;
 - Jasa tambat labuh;
 - Jasa pas masuk;
 - Jasa pekerjaan perbengkelan;
 - Jasa kebersihan/kebersihan kolam Pelabuhan;
 - Jasa Listrik;
 - Jasa penggunaan kendaraan.

Pada Triwulan 2 tahun 2025 diperoleh realisasi penerimaan PNBP sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis Penerimaan di PPN Ternate Selama Bulan Januari-Maret 2025

No	Bulan	Target Tahun 2025		Realisasi Triwulan 2 2025	
		Umum	Fungsional	Umum	Fungsional
1.	Januari	Rp.27.000.000	Rp. 2.267.000.000	Rp. 749.402	Rp. 299.024.850
2.	Februari			Rp. 749.402	Rp. 214.377.722
3.	Maret			Rp. 749.402	Rp. 203.886.228
4.	April			Rp. 749.402	Rp. 429.692.676
5.	Mei			Rp. 749.402	Rp. 384.072.963
6.	Juni			Rp. 749.402	Rp. 207.698.365
Jumlah		Rp.27.000.000	Rp. 2.267.000.000	Rp.14.181.865	Rp. 1.738.752.805
Total		Rp. 2.294.761.000		Rp. 1.753.684.071	
% Capaian Tahunan		76,42%			

Berdasarkan realiasi PNBP Triwulan 2 tahun 2025, dilakukan pengukuran capaian IKU Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Ternate, Triwulan 2 tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Ternate

Sasaran Kegiatan			Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Ternate				
Indikator Kinerja			Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Ternate (Rp. Juta)				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 2 Tahun 2025			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
806.210	583.321	596.488	1.147,38	1.753,68	120	265.618.000	36,59%

- Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**
 Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi Triwulan 2 tahun 2025 mencapai 120% atau Rp 1.753,68 Juta dari target Rp 1.147,38 Juta, karena pengukuran capaian menggunakan metode pengukuran triwulan sehingga nilai realisasi melebihi dari target Triwulan 2 tahun 2025.
- Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya**
 Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Triwulan 2 dari tiga tahun terakhir, terlihat realisasi Triwulan 2 tahun 2025, mengalami penurunan sekitar 10% sedangkan jika dibandingkan dengan Triwulan 2 tahun 2023 dan 2024 maka realisasi Triwulan 2 tahun 2025 mengalami peningkatan yaitu 2023 ke 2024 atau naik sekitar 2.26% kenaikan ini tergolong stabil atau menggambarkan penerimaan yang konsisten namun tidak terlalu signifikan, sedangkan Triwulan

2 2024 ke 2025 realisasi melonjak dari 596.488 ke 725.190, dengan kenaikan sekitar 21.58%. Ini menunjukkan adanya penerimaan yang cukup besar di Triwulan 2 2025.

3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan realiasi Triwulan 2 tahun 2025 dengan target tahun 2025 mencapai 76,52%, sehingga bila realisasi Nilai PNBP Non SDA di PPN Ternate dapat dipertahankan sepanjang tahun, maka realisasi dapat mencapai, bahkan melebihi target tahunan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Jika dilakukan Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU Nilai PNBP Non SDA di PPN Ternate yaitu adanya beberapa jenis penerimaan fungsional yang realisasi Triwulan 2 tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Ringkasan Capaian PNBP Jenis Penerimaan Fungsional Triwulan 2 Tahun 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Sewa Bangunan Permanen	9.100.000	13.237.155	145,46%
Pemeliharaan	9.000.000	5.188.542	57,65%
Jasa Bengkel	120.680.000	33.110.000	27,44%
Pengembangan / Tanah	90.753.000	38.649.900	42,59%
Cold Storage	616.927.000	296.050.395	47,99%
Jasa Mobil	20.550.000	275.000	1,34%
Jasa Tangki BBM	5.400.000	862.500	15,97%
TPB / Cool Box	68.750.000	12.083.000	17,58%
Jasa Tambat Labuh	59.400.000	8.290.682	13,96%
Jasa Pemakaian Listrik	98.475.000	17.627.746	17,90%

1) PNBP yang menyumbang penerimaan >30% dari target tahunan) bersumber dari :

- Pendapatan sewa bangunan permanen;
- Pendapatan pemeliharaan (sewa lahan).
- Pendapatan pengembangan (sewa lahan)
- Pendapatan ABF/Cold Storage/Cold Room
- Pengadaan air, pengadaan es;

- Pendapatan pas masuk dan perbengkakan
- 2) PNBP yang penyumbang penerimaan (<25% dari target tahunan) bersumber dari:
 - Penerimaan jasa sewa tangka BBM;
 - Penerimaan jasa mobil (alat berat);
 - Tambat labuh dan penerimaan pemakaian Listrik

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan 2 tahun 2025 antara lain:

- 1) Fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan di PPN Ternate
- 2) Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan sebelumnya
- 3) Koordinasi dengan instansi terkait dan stake holder terkait SOP Pelayanan dan peluang investasi usaha.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Nilai PNBP Non SDA di PPN Ternate

3.2.2. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat

Sasaran kegiatan didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

IKU 2 VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indikator tersebut diukur berdasarkan hasil perhitungan jumlah pendaratan ikan yang masuk ke PPN Ternate baik melalui kapal penangkap maupun kapal penampung yang didaratkan di dermaga PPN Ternate serta jumlah ikan kiriman yang masuk ke PPN Ternate.

Volume produksi perikanan tangkap merupakan indikator yang menggunakan

pengukuran capaian triwulan dengan mengakumulasi jumlah volume produksi dari setiap bulan

Formula Perhitungan Sebagai Berikut:

$$\text{Capaian TW1} = \text{Produksi bulan 1} + \text{bulan2} + \text{bulan3}$$

$$\text{Capaian IKU} = \text{TW1} + \text{TW2} + \text{TW3} + \text{TW4}$$

Volume produksi perikanan tangkap di PPN Ternate selama Triwulan 2 2025 bersumber dari produksi pendaratan ikan dari kapal perikanan dan produksi ikan kiriman yang masuk ke PPN Ternate sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate Bulan Januari – Juni 2025

No	Produksi Perikanan	Volume (kg)
		Januari s.d. Juni
1	Produksi hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPN Ternate (dalam pelabuhan)	648.554
2	Produksi pemasaran ikan dari luar pelabuhan ke PPN Ternate	1.209.937
	Total	1.858.491

Berdasarkan realisasi produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPN Ternate pada Triwulan 2 2025, dilakukan pengukuran Capaian indikator kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate

Sasaran Kegiatan			Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Ternate				
Indikator Kinerja			Volume Produksi Perikanan tangkap di PPN Ternate (Ton)				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 2 Tahun 2025			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
811,86	886,09	913,84	2.000	1.858,491	92,92	13.605.000	60,32

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Berdasarkan tabel di atas terlihat realisasi Triwulan 2 tahun 2025 mencapai 1.858,49 Ton atau mencapai 92,92% dari target 2.000 Ton.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, terlihat realisasi Triwulan 2 tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5% hingga 10%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan 2 tahun 2025 sebesar 1.056,58 Ton dengan target tahun 2025 sebesar 4.000 Ton, maka realisasi capaian tahunan masih mencapai 46,45% dari target tahunan.

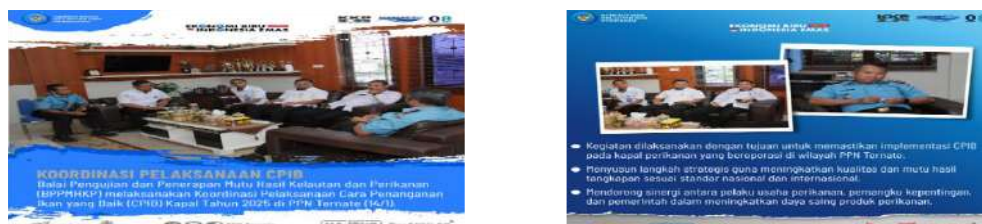
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang menghambat tercapaian realisasi volume produksi perikanan tangkap di PPN Ternate yaitu produksi pemasaran/ikan kiriman dari daerah Bacan yang menurun karena harga ikan yang berfluktuasi dan cenderung lebih tinggi di pasar ikan di PPN Ternate. Selain itu jumlah produksi pendaratan di PPN Ternate mengalami penurunan karena memasuki musimpaseklik di triwulan 2 serta kondisi cuaca yang mengakibatkan menurunnya aktivitas penangkapan ikan.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan 2 tahun 2025 yang mendukung pencapaian indikator kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate yaitu:

- Meningkatkan kegiatan pendataan untuk kapal perikanan <5 Gt;
- Bekerjasama dengan Satwas PSDKP Ternate untuk mendorong agar kapal-kapal ijin daerah yang berdomisili di luar PPN Ternate untuk melakukan aktivitas bongkat di PPN Ternate



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate

- Meningkatkan komunikasi dengan pelaku usaha/pengusaha untuk mendapatkan penyampaian data produksi secara real-time.

3.2.3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Sasaran kegiatan didukung oleh 5 (lima) Indikator Kinerja yaitu:

IKU 3 PERSENTASE PERMOHONAN PENGUSAHAAN YANG DIANALISA DAN/ATAU DIEVALUASI DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusaha. Fungsi pengusaha merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi penerimaan dari pelabuhan perikanan diantaranya melalui sewa lahan/gedung/bangunan yang dalam prosesnya dibutuhkan analisa dan evaluasi terhadap permohonan penggunaannya.

Indikator capaian menggunakan pengukuran tahunan dengan formula perhitungan:

$$\text{Indikator I : } \frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Pengusahaan terhadap usulan pengusaha baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi}}{\text{Total jumlah usulan pengusaha yang masuk di (nama satker)}} \times 80\%$$

Indikator II : Ruang lingkup pelayanan pengusaha yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 %

Persentase Pengusahaan = Indikator I + Indikator 2

Realisasi indikator persentase permohonan pengusaha yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate belum dilakukan pengukuran karena merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pengukuran akan dilakukan pada triwulan ke empat.

IKU 4 TINGKAT KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indikator kinerja ini merupakan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan perikanan sesuai dengan keputusan Dirjen No.20/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi

PIPP. Penilaian kinerja operasional PPN Ternate melalui aplikasi PIPP berdasarkan 27 kriteria penilaian antar yaitu 9 Parameter Administrasi dan Sistem Informasi, 6 parameter Fasilitas Pelabuhan Perikanan, 9 Parameter Pelayanan Publik dan 3 Parameter Investasi dan Industri.

Pengukuran capaian Tingkat Kinerja PPN Ternate dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan formula:

Formula Perhitungan :

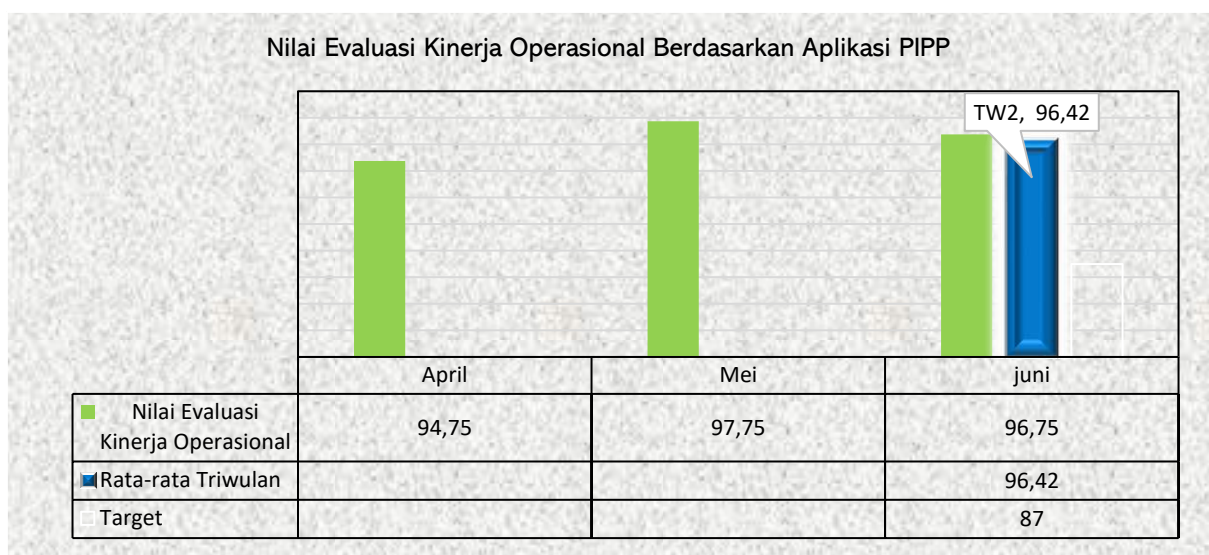
$$NK = \frac{\text{Bobot(A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$$

Keterangan :

1. Sangat baik jika NK = (86 - 100)
2. Baik jika NK = (66 - 85)
3. Sedang jika NK : (46- 65)
4. Kurang jika NK = (0 - 45)

Keterangan:
 Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Nilai kinerja Operasional PPN Ternate selama Triwulan 2 tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1. Nilai Kinerja Operasional PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025

Berdasarkan realisasi nilai kinerja operasional PPN Ternate pada Triwulan 2 2025, dilakukan pengukuran Capaian indikator kinerja Tingkat Kinerja PPN Ternate sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator Tingkat Kinerja PPN Ternate

Sasaran Kegiatan			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan bertanggung Jawab				
Indikator Kinerja			Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 2 Tahun 2025			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
81,17	93,58	95,42	87	96,42	110,8	15.081.000	22,86

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi Triwulan 2 tahun 2025 mencapai 110,8% atau 96,42 dari target 87 sehingga nilai realisasi melebihi dari target Triwulan 2 tahun 2025.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Triwulan 2 tahun 2025 menunjukkan tren positif dan konsisten naik dari Triwulan 2 tahun 2022 hingga tahun 2024. Realisasi Triwulan 2 tahun 2025 berhasil melampaui target sebesar 10,08 poin dengan capaian 110,80 menandakan pengelolaan PPN Ternate semakin berjalan optimal dengan peningkatan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan peningkatan dari 3 tahun sebelumnya.

3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, maka realisasi nilai kinerja organisasi di Triwulan 2 tahun 2025 telah melampaui target tahunan, sehingga jika kinerja tetap konsisten dilaksanakan maka pada triwulan berikutnya tetap akan menunjukkann nilai yang optimal.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung tercapainya realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate pada Triwulan 2 tahun 2025 adalah beberapa indikator utama menunjukkan pencapaian optimal terutama dalam frekuensi pengiriman data PIPP Mobile, realisasi anggaran, pendapatan pelabuhan, pelayanan tambat labuh, pengadaan air dan distribusi kebutuhan kapal. Infrastruktur

pendukung, seperti Panjang dermaga, kedalaman kolam, dan fasilitas pemasaran, juga berfungsi dengan baik.

Tabel 10 Nilai Kinerja Operasional PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025

No	Jenis Kriteria	Unit Satuan	April		Mei		Juni		Keterangan
			Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	Realisasi	Nilai	
1	Frekuensi Pengiriman Data (PIPP)	Kali	21,00	5,00	28,00	5,00	23,00	5,00	Lebih dari 20 kali
2	E-Logbook	Ya/Tidak	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	—
3	Aplikasi SPB-online	Ya/Tidak	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	—
4	SHTI	Ya/Tidak	Ya	2,00	Ya	2,00	Ya	2,00	—
5	Realisasi Penyesuaian Anggaran	%	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	Antara 75-100%
6	Pendaftaran Pelabuhan	%	227,37	4,00	203,23	4,00	123,06	4,00	Datas 90% dari target
7	Ketersediaan SDM Pengelola Pelabuhan Perikanan	Kelengkapan	Lengkap	4,00	Lengkap	4,00	Lengkap	4,00	—
8	Kapasitas Daya Tampung Kolam Pelabuhan	GT	849,00	2,00	1.728,00	3,00	1.095,00	2,00	Antara 750 – 2250 GT
9	Panjang Dermaga	M	627,00	4,00	627,00	4,00	627,00	4,00	Datas 150m
10	Kedalaman Kolam	Cm	300,00	4,00	300,00	4,00	300,00	4,00	Datas 3m
11	Sarana Pataikan (Docking, bergkai)	Ada/Tidak Ada	Ada	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00	—
12	Kelengkapan Fasilitas Pemasaran & Distribusi Ikan	Kelengkapan	Lengkap	2,00	Lengkap	2,00	Lengkap	2,00	—
13	Ketersediaan Lahan Pelabuhan	Ha	10,60	4,00	10,60	4,00	10,60	4,00	Datas 10 ha
14	Pelayanan Tambak Luluh	GT	68,00	5,00	117,00	5,00	67,00	5,00	Lebih dari 30 GT
15	Produksi Perikanan	Ton/Hari	1,56	2,50	3,36	2,50	3,20	2,50	Dibawah 5 ton
16	Frekuensi Kunjungan Kapal	Unit	39,00	5,00	81,00	5,00	55,00	5,00	Lebih dari 12 unit
17	STBLKK	%	158,97	5,00	113,56	5,00	138,18	5,00	Kapal yang masuk 100 %
18	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah Kegiatan	6,00	4,00	12,00	4,00	5,00	4,00	Datas 3 kali
19	Fasilitas Pengolahan, Pengemasan dan Pengangkutan Sumber Daya Ikan, Perikananairan Ikan, Publikasi	Jumlah Kegiatan	30,00	4,00	41,00	4,00	30,00	4,00	Datas 4 kali
20	Pelaksanaan K5	Hasil	Baik	4,00	Baik	4,00	Baik	4,00	—
21	Penyulutan Air Bersih (kapal dan industri pengolahan)	%	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan
22	Penyulutan Es (kapal)	%	100,00	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	Sesuai kebutuhan
23	Penyulutan BBM (kapal)	%	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	Sesuai kebutuhan
24	Pelayanan Pengiriman Hasil Perikanan di VKOPP	Unit	16,00	4,00	16,00	4,00	16,00	4,00	Datas 15 unit
25	Pemerataan Lahan Pelabuhan	%	80,80	3,00	90,80	3,00	80,80	3,00	Sangat optimal (80 – 100 %)
26	Penyusunan Tenaga Kerja	Orang/Bulan	1.305,22	2,25	1.319,57	2,25	1.289,08	2,25	Antara 1000 – 1500 orang
27	Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan	Perusahaan/Bulan	48 (51)	4,00	48 (51)	4,00	48 (51)	4,00	—
Jumlah				94,75		97,75		96,75	
Kesimpulan dan Rekomendasi Data-cala Triwulan Ke-2						96,42			SANGAT BAIK

Sumber Data: Aplikasi PIPP

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan 2 tahun 2025:

- 1) Peningkatan pelayanan STBLK dan SPB
- 2) Pelayanan pengendalian air bersih, kegiatan pendaratan dan pengiriman data PIPP Mobile dan Pelaksanaan K5

IKU 5 TINGKAT PELAYANAN KESYAHBANDRAAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 dikatakan bahwa Pelabuhan Perikanan memiliki 2 fungsi yaitu fungsi perusahaan dan fungsi pemerintahan, diantara fungsi pemerintahan adalah Pelabuhan perikanan melakukan pelayanan terhadap kapal perikanan yaitu pelayanan kesyahbandaran. Diantara pelayanan kesyahbandaran yaitu pelayanan Penribitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan

(STBLKK), Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran diukur dengan menggunakan formula:

FORMULA PERHITUNGAN = SPB + STBLK + SHTI

Bobot 40% SPB = (Jumlah SPB yang Diterbitkan/Jumlah Kapal yang beraktivitas) x 100

Bobot 40% STBLK = (Jumlah STBLK yang Diterbitkan/Jumlah Kapal yang beraktivitas) x 100

Bobot 20% SHTI = (Jumlah permintaan SHTI /Jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100)

Realisasi indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate belum dilakukan pengukuran karena merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pengukuran akan dilakukan pada triwulan ke empat.

IKU 6 PERSENTASE PENGENDALIAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Perikanan, PPN Ternate dituntut untuk memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat perikanan, dengan jalan melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas di PPN Ternate.

Adapun formula perhitungan yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Pengembangan Fasilitas PPN Ternate}}{\text{Master Plan PPN Ternate}} \times 100\%$$

Realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate belum dilakukan pengukuran karena merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pengukuran akan dilakukan pada triwulan ke empat.

IKU 7 NILAI PENGENDALIAN LINGKUNGAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang merupakan indikator terkait tata Kelola lingkungan di Pelabuhan perikanan, merupakan indikator baru yang dimasukkan dalam PK Revisi. Indikator tersebut diukur berdasarkan hasil perhitungan nilai pada aplikasi SELARASKAN yang merupakan Sistem informasi berbasis Web yang berfungsi sebagai alat monitoring tata Kelola lingkungan di Pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang diupdate berkala dan dicantumkan dalam bentuk score Pelabuhan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.
- SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.

Adapun formula perhitungan capaian iku sebagaimana formula berikut:

$$\text{Nilai Bulanan} = \text{Skor Indikator Program (60\%)} + \text{Skor Hasil (40\%)}$$

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Nilai TW4}(b1 + b2 + b3)}{3}$$

Tabel 11. Nilai Implementasi Selamatkan PPN Ternate yang telah dievaluasi Selama Bulan Januari-Maret 2025

No	Bulan	Nilai	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
1	April	91,19	270,302	90,11	Sangat Baik
2	Mei	88,54			
3	Juni	89,59			

Berdasarkan realiasi PNBPN Triwulan 2 tahun 2025, dilakukan pengukuran capaian IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate, Triwulan 2 tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate

Sasaran Kegiatan			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
Indikator Kinerja			Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate (Nilai)				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 2 Tahun 2025			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
-	-	87,29	30,10	90,11	120	930469.000	27,82%

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi Triwulan 2 tahun 2025 mencapai 120% atau nilai 90,11 dari target nilai 30,10, karena pengukuran capaian menggunakan metode pengukuran triwulan sehingga nilai realisasi melebihi dari target Triwulan 2 tahun 2025.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan, merupakan indikator yang diukur sejak tahun 2024, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan Triwulan 2 tahun 2024.

Berdasarkan data realisasi terjadi peningkatan capaian dari Triwulan 2 tahun 2025 sebesar 1,69 nilai Triwulan 2 2024. Walaupun peningkatan nilai tidak

begitu signifikan, namun terdapat peningkatan dalam pengelolaan lingkungan di PPN Ternate.

3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika realisasi Triwulan 2 tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025, maka realisasi telah melampaui target tahunan bahkan mencapai 299% dari target tahunan yang ditetapkan, sehingga bila realisasi tersebut dapat dipertahankan sepanjang tahun, maka dapat dipastikan realisasi dapat melebihi target tahunan.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Jika dianalisa penyebab keberhasilan antara lain di dukung oleh:

- Menugaskan operator Aplikasi Selaraskan untuk melakukan update data dukung sesuai kebutuhan di setiap bulan sebelum dilakukan verifikasi penilaian oleh Tim Verifikasi Selaraskan;
- PPN Ternate telah memperoleh Sertifikat ISO 14001 terkait lingkungan, sehingga di setiap aktivitas pengelolaan lingkungan PPN Ternate berupaya untuk melakukan penerapan dalam lingkungan kerja dan aktivitas pelayanan;
- Adanya efisiensi pemakaian listrik dan air setiap bulan dengan diberlakukannya sistem kerja *Work From Anywhere* (WFA) khusus di hari Jumat dengan hanya menugaskan petugas pelayanan yang wajib untuk berkerja dari kantor, sedangkan petugas administrasi dapat bekerja dari mana saja, sehingga sangat menekan efisiensi pemakaian Listrik dan air;

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan 2 tahun 2025 antara lain:

- 1) Pelaksanaan kebersihan area pelabuhan secara harian
- 2) Efisiensi pemakaian listrik dan air setiap bulan
- 3) Kegiatan rutin patroli energi dan air serta patroli keselamatan dan keamanan area dermaga



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate

3.2.4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

IKU 8 KAPAL PERIKANAN IZIN DAERAH YANG MEMENUHI KETENTUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa kewenangan Penerbitan Sertifikasi Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Indikator pengukuran capaian merupakan jumlah hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan yang telah diterbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yang diterbitkan di PPN Ternate.

Pengukuran capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dihitung secara kumulatif dari penerbitan Dokumen SKKP setiap bulan. Capaian indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \text{SKKP b1} + \text{SKKP b2} + \dots \text{dst SKKP b12}$$

Keterangan:

Nilai TW I = capaian 2023 + 2024 + TW I;

Nilai TW II = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II;

Nilai TW III = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III;

Nilai TW IV = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III + TW IV

Tabel 13. Jumlah SKKP yang diterbitkan di PPN Sampai dengan Triwulan 2 2025

No	Bulan	Jumlah	Target TW2	%Capaian
Capaian Tahun 2024		268		
TRIWULAN 2 TAHUN 2025			818	
1	Januari	13		
2	Februari	5		
3	Maret	6		
4	April	5		
5	Mei	9		
6	Juni	7		
Capaian TW1		313	318	98,42%

Berdasarkan realiasi Penerbitan SKKP Triwulan 2 tahun 2025, dilakukan pengukuran capaian IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, Triwulan 2 tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14. Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Kegiatan			Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Indikator Kinerja			Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 2 Tahun 2025			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
-	-	158	318	313	98,43	-	-

- Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**
 Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi Triwulan 2 tahun 2025 mencapai 98,43% atau 313 Kapal dari target 318 Kapal. Berdasarkan data realisasi Triwulan 2 tahun 2025 tidak mencapai target Triwulan 2 2025 yang ditetapkan.
- Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya**
 Berdasarkan data realisasi terjadi peningkatan capaian dari Triwulan 2 tahun 2024 dari 158 kapal mencapai 292 kapal yang diterbitkan SKKP pada Triwulan 2 tahun 2025. Peningkatan jumlah kapal tersebut dipengaruhi oleh adanya perhitungan akumulasi penerbitan SKKP dari tahun 2024 hingga Triwulan 2

tahun 2025, sehingga dipastikan adanya peningkatan dari Triwulan 2 tahun sebelumnya.

3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika realisasi Triwulan 2 tahun 2025 sebanyak 292 kapal, dibandingkan dengan target tahun 2025 sebanyak 368 kapal, maka realisasi masih sangat jauh dari target tahunan, sehingga diharapkan untuk dapat memfasilitasi seluruh permohonan penerbitan SKKP sehingga dapat mencapai target tahun 2025

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Salah satu pendukung tercapainya realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan karena adanya kemudahan dalam pengurusan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yaitu adanya Surat Edaran MKP tentang mekanisme perpanjangan SKKP pada tahun 2025 Bagi kapal yang masih di laut dan sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan, dapat mengajukan perpanjangan SKKP dengan masa berlaku hanya sampai dengan 30 April 2025, Sementara itu, bagi kapal perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan pada tahun 2024 yang tidak mengalami perubahan teknis fungsi kapal dan API dapat melakukan pembaruan perpanjangan SKKP tanpa dilakukan pemeriksaan fisik kapal dengan masa berlaku 1 tahun sesuai permohonan dan untuk pengajuan permohonan baru atau perpanjangan secara reguler dilakukan pemeriksaan fisik kapal dilokasi pelabuhan sesuai pangkalan.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan 2 tahun 2025 antara lain:

1. Memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan ijin pusat dan ijin daerah;
2. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait sinergitas pelayan keselamatan kapal perikanan <5 Gt.
2. Melaksanakan Sosialisasi Terkait Mekanisme baru SKKP



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Kapal perikanan izin Daerah di PPN Ternate

IKU 9 TINGKAT PEMENUHAN PERSYARATAN BEKERJA AWAK KAPAL PERIKANAN

IKU Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan adalah indikator baru yang dimunculkan ditahun 2025. Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.

Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut:

- Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;
- Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;
- Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;
- Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”;

Indikator ini mencerminkan seberapa besar tingkat pemenuhan standar kelayakan kerja bagi awak kapal perikanan di PPN Ternate.

Pengukuran capaian Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan diukur secara semester dengan menggunakan formula:

(1) Kepatuhan s.d. 5 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}}$	Keterangan : (a) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (b) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (sesuai SE) (c) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (Wajib lengkap 0.75 untuk kapal >100 Laut Lepas (d) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib 1,00 dilengkapi untuk kapal >300GT) (e) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (a) (f) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (b) (g) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (c) (h) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (d)
(2) Kepatuhan > 5 s.d. 30 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}}$	
(3) Kepatuhan >30 s.d. 100 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB >30 s.d. 100 GT}}$	
(4) Kepatuhan ≥100 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB ≥100 GT}}$	
(5) Kepatuhan ≥100 GT Laut Lepas	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB ≥100 GT Laut Lepas}}$	
(6) Kepatuhan ≥300 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB ≥300 GT}}$	
Total Nilai	$= \frac{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}{6 \text{ (sesuai range ukuran kapal yg ada di pelabuhan)}}$	

Jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah nilai masing-masing kepatuhan di setiap range GT Kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT Kapal yang terdapat di Pelabuhan.

Status	Nilai	Batas Bawah	Kategori Pemenuhan Persyaratan	Batas Bawah	Status	TARGET 2025
Tingkat Kepatuhan 1	£0,25	0	Kurang	0	Tingkat Kepatuhan 1	
Tingkat Kepatuhan 2	>0,25 s.d. <0,50	0,26	Cukup	0,26	Tingkat Kepatuhan 2	0,26
Tingkat Kepatuhan 3	>0,50 s.d. <0,75	0,51	Baik	0,51	Tingkat Kepatuhan 3	
Tingkat Kepatuhan 4	>0,75 s.d. 1,00	0,76	Sangat Baik	0,76	Tingkat Kepatuhan 4	

Pengukuran capaian IKU Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan menggunakan pengukuran semester, sehingga capaian di twulan 2 tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15. Data Capaian Tingkat Pemenuhan persyaratan Bekerja Awak kapal Perikanan Triwulan 2 Tahun 2025

No.	Jenis Kriteria Ukuran	Rata2 Nilai Kriteria	Kategori Pemenuhan Persyaratan
1	s.d. 5 GT	0,91	Sangat Baik
2	> 5 s.d. 30 GT	0,42	Cukup
3	>30 s.d. 100 GT	0,38	Cukup
Nilai Rata-Rata		1,70	0,57
Jumlah jenis kriteria range data (menyesuaikan dgn kondisi di pelabuhan)		3	Baik
			Tingkat Kepatuhan 3

Berdasarkan realiasi Penerbitan SKKP Triwulan 2 tahun 2025, dilakukan pengukuran capaian IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, Triwulan 2 tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 16. Capaian Indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025

Sasaran Kegiatan			Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Indikator Kinerja			Tingkat pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak kapal Perikanan				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 2 Tahun 2025			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
-	-	158	0,26	0,57	120	-	-

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi Triwulan 2 tahun 2025 mencapai 120% atau 0,57 dari target 0,26.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Nilai realisasi tidak dapat dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru di tahun 2025.

3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka realisasi triwulan 2 telah melampaui target tahunan.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun faktor yang mendukung tercapainya indikator Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Ternate, ada 3 kategori ukuran kapal perikanan yang beraktivitas di PPN Ternate yaitu kategori s.d 5 GT, > 5 GT – 30 GT dan > 30 GT – 100 GT. Berdasarkan hasil pengukuran dari 529 SPB yang diterbitkan selama bulan Januari-Juni 2025, diperoleh hasil 144 kapal yang memiliki kelengkapan dokumen kapal perikanan yang termasuk dalam kategori sangat Baik (Sangat Lengkap), 27 kapal termasuk kategori Baik (Lengkap), namun masih ada 354 kapal dalam kategori Kurang (dokumen kurang) sehingga hal tersebut sangat memengaruhi pencapaian Indikator

PPN Ternate menunjukkan **tingkat kepatuhan yang baik (0,57)** terhadap pemenuhan persyaratan awak kapal perikanan pada Triwulan 2 2025. Namun, perlu adanya ruang

peningkatan terutama pada kapal ukuran > 5 GT – 30 GT dan >30 GT – 100 GT yang hanya mencapai kategori "cukup". Hal ini bisa menjadi fokus pembinaan dan sosialisasi selanjutnya.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa program/ kegiatan antara lain :

1. Memfasilitasi Pengurusan Perjanjian Kerja Laut
2. Melaksanakan Sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan komperansi nelayan;
3. Memfasilitas pembuatan Buku Kapal Perikanan

3.2.5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

IKU 10 NILAI PM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indikator kegiatan pada merupakan kegiatan pembangunan zona integritas yaitu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengukuran indikator ini berupa pemenuhan dokumen yang diukur mandiri berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan dengan menyesuaikan nilai capaian dengan ketersediaan dokumen-dokumen pembangunan zona integritas di PPN Ternate. Adapun pengukuran berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan Lampiran III Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Indikator dilakukan pengukuran secara tahunan menggunakan Lembar Evaluasi sesuai berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 54 tahun 2024.

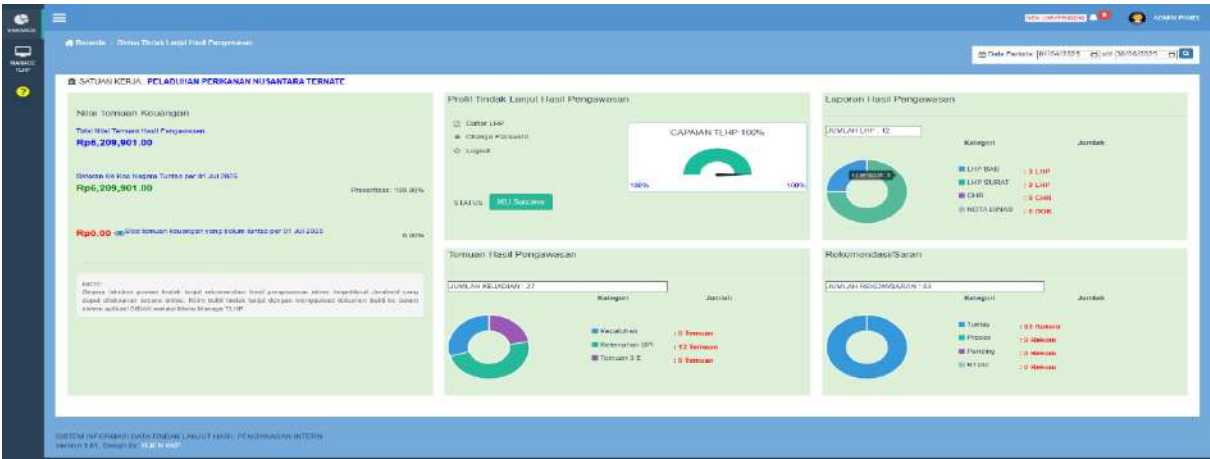
IKU 11 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk

Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate merupakan hasil penyelesaian terhadap temuan pengelolaan keuangan dan operasional PPN Ternate. Hasil penyelesaian dapat dilihat pada aplikasi sidak.kkp.go.id yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Formula pengukuran capaian indikator menggunakan rumus:

$$Capaian\ IKU = \frac{Total\ Rekomendasi\ TW4\ 2024}{Total\ Rekomendasi\ ditindaklanjuti\ s.d\ TW4\ 2025} \times 100\%$$

Data dukung pengukuran diperoleh dari dashboar aplikasi sidak.kkp.go.id sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 7. Dashboard Aplikasi Sidak.kkp.go.id Triwulan 2 Tahun 2025

Tabel 17. Perbandingan Capaian Indikator Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.

Sasaran Kinerja 5		Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Ternate				
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Capaian Tahun Sebelumnya		Triwulan 2 Tahun 2025			ANGGAR AN (RP)	REAL ISASI (%)
TW 2 2023	TW2 2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
-	100	85	100	117,65	-	-

- Membandingkan Target dan realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**
Berdasarkan realisasi bahwa rekomendasi sampai dengan triwulan 2 tahun 2025 seluruhnya telah ditindak lanjuti sehingga terealisasi 100% atau mencapai 117,65% dari target tahun 2025.
- Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta capaian Kinerja Triwulan**

Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Nilai realisasi dengan tahun 2024 memiliki capaian yang sama yaitu 100% karena seluruh rekomendasi telah ditindak lanjuti.

3) Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan berjalan dengan Target Tahununan

Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka ralisasi triwulan 2 tahun 2025 telah melampaui target tahunan, namun nilai tersebut masih dapat berubah karena masih ada 6 (enam) bulan yang perlu dilalui sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih lanjut jika ada rekomendasi di bulan berikutnya agar dapat mencapai target tahunan.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Salah satu pendukung tercapainya realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan salah satu indikator yang seluruh rekomndasinya telah ditindaklanjuti sehingga dapat mencapai realisasi 100%

5) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Kegiatan yang mendukung pencapaian yaitu dilakukannya tindak lanjut dari tim pengawasan ke aplikasi SIDAK.

IKU 12 NILAI PM SAKIP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indikator Nlai Penilaian Mandiri SAKIP merupakan penilaian mandiri yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi. Selaras dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Lingkup Kementarian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja KKP, maka Ditjen Perikanan Tangkap melakukan Penyesuaian pada Pedoman Evaluasi AKIP tahun 2025. Adapun pembobotan nilai evaluasi AKIP sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18. Pembobotan Nilai Evaluasi AKIP

Komponen	Sub-komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Indikator Nilai PM SAKIP di ukur secara tahunan sehingga untuk triwulan 2 tahun 2025 belum ada realisasi.

IKU 13 INDEKS PROFESIONALISME ASN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Berdasarkan Permen PANRB Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu:

- a) Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- b) Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- c) Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, dan
- d) Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah di alami.

Formula yang digunakan dalam melakukan pengukuran IP ASN berdasarkan hasil penginputan yang dilakukan pegawai berdasarkan 4 (empat) dimensi tersebut dalam aplikasi MyASN BKN, dan akan terintegrasi kedalam aplikasi ropeg.kkp.go.id diman nilai IP ASN Pegawai akan tergambar dalam aplikasi tersebut.

Tabel 19. Perbandingan Capaian IP ASN Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.

Sasaran Kinerja 5		Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Ternate				
Indikator Kinerja		Indek Presionalisame ASN di PPN Ternate				
Capaian Tahun Sebelumnya		Triwulan 2 Tahun 2025			ANGGAR AN (RP)	REAL ISASI (%)
TW 2 2023	TW2 2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
70	72	82	82,79	101	-	-

1) Membandingkan Target dan realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Berdasarkan realiasi triwulan 2 tahun 2025, realisasi mencapai target triwulan mencapai 101%

2) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya, terlihat nilai realisasi triwulan 2 tahun 2025 lebih tinggi dengan peningkatan berkisar 10%.

3) Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan berjalan dengan Target Tahununan

Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka ralisasi triwulan 2 tahun 2025 belum mencapai target tahunan dengan indeks 87, sehingga dibutuhkan upaya-uoya untuk mencapai target tahunan.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Nilai realiasasi mencapai target triwulan karena sebagian besar pegawai telah memperoleh nilai tinggi, dengan ditunjang dari peredikat kinerja dengan nilai yang sangat baik dan baik, walaupun masih ada 2 pegawai yang masuk kategori rendah sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi bagi pegawai yang memiliki nilai rendah/kurang.

5) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Capaian kinerja didukung melalui pelaksanaan beberaka program kegiatan, antara lain:

- Melakukan pembinaan kepada pegawai sebagai upaya peningkatann kinerja secara menyeluruh;

- Menghimbau pengawai untuk mengikuti Diklat Minimal 20 JP serta Diklat Teknis lainnya untuk menunjang peningkatan kompetensi;
- Melakukan Pemetaan Pegawai sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan jenjang jabatan.



Gambar 8. Kegiatan yang dilakukan untuk Mendukung IKU IP ASN

IKU 14 PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Pengukuran capaian secara triwulan dengan menggunakan Formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian IKU berdasarkan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses reviu RUP pada aplikasi SIRUP. Berikut disajikan rekapitulasi perhitungan acapai IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PPN Ternate pada triwulan 2 tahun 2025

Tabel 20. Data Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025

 **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

DIT.JEN PERIKANAN TANGKAP		1,975,582,640,800	1,975,572,169,800	1,975,572,149,800	3,011,491,000	69.49%
1	537911 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,972,739,000	15,972,739,000	15,972,739,000	-	100.00%
2	238720 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	219,592,991,000	219,592,991,000	219,592,991,000	-	100.00%
3	580393 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RITU	3,895,697,000	3,895,697,000	3,895,697,000	-	100.00%
4	622482 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAHMAN	435,112,813,000	435,112,813,000	435,112,813,000	-	100.00%
5	519117 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	3,940,804,800	3,940,804,800	3,940,804,800	-	100.00%
6	239750 BALAI BESAR PENANGKAPAN WAN SEMARANG	4,949,394,000	4,949,394,000	4,949,394,000	-	100.00%
7	239771 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	1,922,347,000	1,922,347,000	1,922,347,000	-	100.00%
8	427970 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,003,286,000	2,003,286,000	2,003,286,000	-	100.00%
9	427992 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	3,196,346,000	3,196,346,000	3,196,346,000	-	100.00%
10	427995 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAJIAN	6,498,030,000	6,498,030,000	6,498,030,000	-	100.00%
11	580401 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,877,456,000	2,877,456,000	2,877,456,000	-	100.00%
12	531468 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,011,491,000	3,011,491,000	-	3,011,491,000	0.00%
13	239891 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000	2,200,792,000	2,200,792,000	-	100.00%
14	239235 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,481,000	2,089,481,000	2,089,481,000	-	100.00%
15	633707 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,313,949,000	59,313,949,000	59,313,949,000	-	100.00%
16	537995 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	36,040,778,000	36,040,778,000	36,040,778,000	-	100.00%
17	622475 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,959,181,000	1,959,181,000	1,959,181,000	-	100.00%
18	622461 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	3,708,065,000	3,708,065,000	3,708,065,000	-	100.00%
19	633893 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	-	100.00%
20	427961 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,806,316,000	2,806,316,000	2,806,316,000	-	100.00%
21	239146 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,195,671,000	3,195,671,000	3,195,671,000	-	100.00%
22	239221 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG RANDAI	1,874,832,000	1,874,832,000	1,874,832,000	-	100.00%
23	239214 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	1,215,163,000	1,215,163,000	1,215,163,000	-	100.00%
24	310719 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KIBANGDANG	2,884,668,000	2,884,668,000	2,884,668,000	-	100.00%

Berdasarkan realiasi sebagaimana tabel di atas dilakukan pengukuran realiasi Triwulan 2 tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21. Capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025

Sasaran Kegiatan			Terwujudnya Layanan DUKungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Indikator Kinerja			Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Ternate				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 2 Tahun 2025			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
-	-	-	76	100	120	-	-

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat realiasasi Triwulan 2 tahun 2025 mencapai 120% atau 100 dari target 76

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Nilai realisasi tidak dapat dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru di tahun 2025.

3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka realisasi triwulan 2 telah melampaui target tahunan.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi capaian IKU didukung oleh penyesuaian Pagu pada aplikasai SIRUP dari hasil Revisi DIPA, penyesuaian ini dapat konsisten dilakukan karena di PPN Ternate terdapat 1 (satu) fungsional PBJ Muda yang penempatan tugasnya di PPN Ternate, sehingga memudahkan pepantauan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa program/ kegiatan antara lain :

- Melakukan revisi halaman III DIPA serta revisi POK;
- Koordinasi yang intensig dengan Eselon I DJPT serta koordinasi dengan Kanwil DJPB Maluku Utara.

IKU 15 PERSENTASE PENGELOLAAN BMN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Kepatuhan BMN adalah kegiatan memastikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pengamanan dan penghapusan aset tersebut, bertujuan agar pengelolaan BMN tertib, akuntabel, dan tidak menimbulkan kerugian negara.

Kepatuhan BMN meliputi beberapa tahapan pengelolaan aset negara:

1. Pengadaan: Memastikan BMN diadakan sesuai kebutuhan dan ketentuan.
2. Penggunaan dan Pemanfaatan: Penggunaan BMN yang harus sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, serta upaya optimalisasi aset melalui pemanfaatan seperti sewa atau pinjam pakai.

3. Pengamanan: Melakukan tindakan fisik, administratif, dan hukum untuk menjaga aset tetap terpelihara dan terlindungi dari penyalahgunaan.
4. Pemeliharaan: Merawat BMN agar tetap dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
5. Penatausahaan: Melakukan pencatatan dan administrasi yang tertib terhadap seluruh BMN.
6. Penghapusan dan Pemindahtanganan: Menghapus BMN yang sudah tidak memiliki nilai manfaat, atau melakukan pemindahtanganan (seperti penjualan, hibah) jika BMN tidak lagi digunakan atau tidak memberikan manfaat optimal.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Ternate diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Pengukuran IKU Persentase Pengelolaan Bmn Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate secara tahunan, sehingga belum ada realisasi pada triwulan 2 tahun 2025.

IKU 16 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

IKPA adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, sebuah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas kinerja pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia. IKPA mengukur tiga aspek utama: kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah memastikan anggaran negara digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel, serta mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Aspek yang Diukur dalam IKPA

IKPA menilai kualitas pelaksanaan anggaran dari tiga sisi:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%):

Menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan rencana yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%):

Menilai kemampuan Satuan Kerja (Satker) dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan, termasuk penyerapan anggaran, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), serta penyerahan data kontrak secara tepat waktu.

3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%):

Menilai pencapaian output (hasil) dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang sesuai dengan target pembangunan.

Fungsi IKPA

- **Alat Monitoring dan Evaluasi:**

Untuk memantau kinerja pelaksanaan anggaran oleh setiap satker secara berkelanjutan.

- **Pengukuran Kualitas:**

Mengukur efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penggunaan anggaran.

- **Pendorong Peningkatan Kinerja:**

Mendorong satker untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggarannya agar mencapai nilai IKPA yang baik.

- **Dasar Reward dan Punishment:**

Memberikan umpan balik, yang dapat menjadi dasar untuk memberikan penghargaan (reward) atau sanksi (punishment).

- **Alat Kontrol:**

Sebagai alat kontrol dalam pengawasan pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja.

Elemen yang Memengaruhi Nilai IKPA

Nilai IKPA dipengaruhi oleh beberapa elemen pengelolaan kinerja keuangan, seperti: Jumlah revisi DIPA, Penyampaian dan deviasi data kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan TUP, Kepatuhan penyampaian laporan data kontrak secara tepat waktu.

Formula pengukuran berdasarkan: Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi.

Tabel 22. Nilai IKPA PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Bentuk Output : LEM																
No	Kode K/PPN	Kode BA	Kode Subter	Uraian Subter	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Koreksi Subst.	Dispensasi/SPM (Programing)	Nilai Akhir (Nilai Total/Koreksi Subst.)
						Revisi DIPA	Defisit Anggaran di DIPA	Pengurangan Anggaran	Saldo Anggaran Kontrol	Pengurangan Tagihan	Pengeluaran MP dan TUP	Capaian Output				
1	002	002	427991	PELAKSANAAN PERIKAWAN SUSANTARA TERMAATE	Total	100.00	00.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.69	100%	0.00	90.69
					Detail	10	00	20	10	00	10	20				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	00.00	00.00	10.00	20.00				
					Nilai Angket	85.13	190.00				100.00					

42 | LKI PPN Ternate

Tabel 23. Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025

Sasaran Kegiatan			Terwujudnya Layanan DUKungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Indikator Kinerja			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Ternate				
Capaian TW2 Tahun Sebelumnya			Triwulan 2 Tahun 2025			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
-	-	97,88	85	98,56	116	-	-

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi Triwulan 2 tahun 2025 mencapai 116% atau 98,56 dari target 85

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Nilai realisasi jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024, terlihat ada peningkatan sebesar 0,68 point.

3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka realisasi triwulan 2 tahun 2025 telah mencapai target tahunan 92, namun nilai tersebut masih dapat berubah sesuai dengan kriteria perhitungan di semester 2 tahun 2025.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dipengaruhi oleh:

- Nilai Kualitas Perencanaan 95,19;
- Nilai Kualitas pelaksanaan anggaran 100
- Nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100

Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan disesuaikan dengan Rencana Operasional Kegiatan dan Halaman III DIPA, melakukan akselerasi pelaksanaan program kegiatan terutama pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa program/ kegiatan antara lain :

- Melakukan revisi halaman III DIPA serta revisi POK;
- Penggunaan Digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas dalam transaksi keuangan.

IKU 17 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan rangkaian proses yang mencakup pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja anggaran untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Kinerja anggaran dapat berupa capaian output kegiatan dan capaian/realisasi anggaran. Makna anggaran di sini mengacu pada alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Aktivitas pada proses evaluasi (kinerja anggaran) mencakup pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja. Pengukuran kinerja melibatkan aspek efisiensi. Efisiensi diukur dengan sebuah formula yang telah ditetapkan.

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler terdiri atas:

1). Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Capaian output Variabel ini terdiri atas Capaian Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target Indikator Output Program dan Capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 43,5 persen.

- b. Penyerapan anggaran Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 28,6 persen.
 - c. Efisiensi Variabel ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat satuan kerja. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 18,2 persen.
 - d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Variabel ini dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 9,7 persen.
- 2). Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat unit eselon I dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:
- a. Capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I.
- 3). Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks
- Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat unit eselon I dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan/atau DIPA, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.
- Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Menteri Keuangan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler untuk tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi ini dilaksanakan untuk menghasilkan informasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan, terutama kebijakan di bidang penganggaran. Data dan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Formula pengukuran NKPA :

NKPA (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran) didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15

Capaian diukur tahunan sehingga pada triwulan 2 tah 2025 belum ada realisasi.

IKU 18 NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh PPN Ternate berdasarkan 9 unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Formula pengukuran berdasarkan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan

Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Berikut hasil pengukuran SKM Triwulan 2 Tahun 2025 lingkup Dirjen Perikanan tangkap;

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
BBPI Semarang	181	3,779	3,735	3,702	3,740	3,724	3,735	3,765	3,740	3,751	93,59
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	674	3,657	3,614	3,650	3,737	3,574	3,593	3,625	3,570	3,625	90,76
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	12	3,917	3,833	3,917	3,833	3,833	3,833	3,917	3,917	3,917	96,99
Direktorat Pertzinan dan Kenelayanan	601	3,553	3,543	3,513	3,547	3,571	3,536	3,547	3,527	3,566	88,70
PPN Ambon	117	3,621	3,603	3,761	3,701	3,769	3,795	3,812	3,752	3,846	94,61
PPN Brondong	133	3,669	3,632	3,602	3,632	3,617	3,556	3,669	3,549	3,534	90,16
PPN Karangantu	216	3,722	3,657	3,694	3,755	3,708	3,704	3,722	3,569	3,486	91,72
PPN Kejawanen	145	3,621	3,655	3,626	3,745	3,621	3,607	3,646	3,766	3,607	95,33
PPN Kwandang	179	3,922	3,660	3,660	3,694	3,653	3,670	3,632	3,649	3,662	95,70
PPN Palabuhanratu	173	3,621	3,751	3,636	3,726	3,627	3,655	3,627	3,621	3,734	95,01
PPN Pekalongan	90	3,755	3,735	3,745	3,724	3,673	3,755	3,816	3,602	3,449	92,36
PPN Pemangkat	220	3,627	3,777	3,614	3,645	3,764	3,766	3,641	3,766	3,764	94,96
PPN Pengambang	123	3,629	3,621	3,766	3,605	3,605	3,605	3,646	3,797	3,613	95,30
PPN Priji	155	3,613	3,794	3,761	3,723	3,746	3,665	3,716	3,766	3,664	93,53
PPN Sibolga	210	3,690	3,705	3,714	3,690	3,705	3,661	3,705	3,714	3,705	92,53
PPN Sungailiat	153	3,610	3,650	3,624	3,604	3,771	3,791	3,610	3,666	3,719	94,63
PPN Tanjungpandan	66	3,943	3,666	3,696	3,666	3,664	3,920	3,909	3,641	3,761	96,97
PPN Ternate	213	3,723	3,661	3,671	3,662	3,704	3,667	3,695	3,657	3,695	92,10
PPN Tual	90	3,811	3,769	3,767	3,622	3,600	3,769	3,622	3,767	3,700	94,91
PPP Teluk Batang	67	3,791	3,761	3,672	3,701	3,731	3,701	3,701	3,672	3,667	92,63
PPS Belawan	166	3,643	3,607	3,643	3,665	3,563	3,619	3,607	3,577	3,524	90,24
PPS Bitung	127	3,772	3,756	3,630	3,717	3,717	3,654	3,732	3,693	3,646	92,54
PPS Bungus	173	3,836	3,946	3,954	3,946	3,936	3,942	3,954	3,946	3,936	96,62
PPS Cilacap	116	3,746	3,695	3,619	3,666	3,666	3,712	3,737	3,712	3,653	92,35
PPS Kendari	92	3,641	3,652	3,663	3,663	3,609	3,565	3,567	3,576	3,567	90,40
PPS Nizam Zachman	145	3,600	3,766	3,731	3,779	3,759	3,759	3,814	3,607	3,752	94,35
DJPT	4871	3,736	3,703	3,701	3,719	3,696	3,682	3,716	3,673	3,664	92,47

Tabel 24. Capaian Indikator Nilai Survei kepuasan Masyarakat lingkup PPN Ternate Triwulan 2 Tahun 2025

Sasaran Kegiatan			Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Indikator Kinerja			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Ternate				
Capaian TW2 Tahun Sebelumnya			Triwulan 2 Tahun 2025			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2022	2023	2024	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
-	-	88,47	88,50	92,10	104,07	-	-

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Jika dibandingkan dengan target triwulan 2 tahun 2025, realisasi telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 104,51%

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Nilai realisasi hanya dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 dimana nilai realisasi triwulan 2 tahun 2025 lebih tinggi 3,63 point.

3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dnegan Target Tahunan

Jika dibandingkan denga target tahun 2025, maka realisasi triwulan 2 tahun 2025 telah melampaui target tahunan, namun nilai tersebut masih dapat berubah sesuai dengan survei yang akan dilakukan di triwulan berikutnya.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atai Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Salah satu yang mendukung realisasi Adalah pelayan pengadaan air yang memperoleh nilai terbesar 92,10 walaupun masih ada nilai SKM pelayanan unit pendingin yang memperoleh nilai cukup kecil yaitu 68,06 sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan evaluasi pelayanan untuk meningkatkan nilai SKM di triwulan berikutnya.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan yaitu:

- Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait jenis-jenis pelayanan dan tata cara pengisian survei sesuai dengan pelayanan yang telah diterima;
- Melakukan pengisian link survey sesaat setelah menerima pelayanan dengan memberdayakan petugas keamanan di ruang pelayanan 1 (satu) atap.



3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 12.655.135.000,- yang akan digunakan untuk kegiatan operasional PPN Ternate serta membiayai kegiatan program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Kelautan serta Dukungan Manajemen dengan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 25 Alokasi Anggaran Kegiatan PPN Ternate Tahun 2025

KODE	KEGIATAN	ALOKASI
<u>2338</u>	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.137.701.000
<u>2341</u>	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	33.460.000
<u>2342</u>	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan tangkap	11.483.975.000
JUMLAH PAGU		12.655.136.000

Realisasi anggaran pada triwulan 2 tahun 2025 sebesar Rp 5.491.247.815,- atau sebesar 43,39% dari pagu yang ditetapkan. Secara rinci realisasi anggaran berdasarkan kegiatan dan jenis belanja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 26. Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan 2 Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi Jenis Belanja		
			Pegawai	Barang	Modal
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.137.701.000		78.208.168	
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	33.460.000			
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan tangkap	11.483.975.000	3.386.422.805	2.026.617.451	
Total		12.655.136.000	5.491.247.815 (43,39%)		

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan 2 2025. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate pada triwulan 2 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) PPN Ternate adalah 110,10% dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan 2	Capaian Triwulan 2	%
Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				120,00
IKU 1. Penerimaan PNB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Rp. Juta)	2.294,76	1.147,38	1.753,68	120,00
Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat				92,92
IKU 2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Ton)	4.000,00	2.000,00	1.858,49	92,92
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab				114,95
IKU 3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	100,00			
IKU 4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	87,00	87,00	96,42	110,83

Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan 2	Capaian Triwulan 2	%
IKU 5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (persen)	55,00			
IKU 6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen)	80,00			
IKU 7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	30,10	30,10	90,11	120,00
Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				111,37
IKU 8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	368,00	318	313	98,43
IKU 9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	0,26	0,57	120,00
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				111,73
IKM 10. Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	75,50			
IKM 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	85,00	85,00	100,00	117,65
IKM 12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	88,00			
IKM 13. Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	87,00	82	82,84	101,02
IKM 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	76,00	76,00	100,00	120,00
IKM 15. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusnatara Ternate (Persen)	81,00			
IKM 16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	92,00	85	98,56	115,56

Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Target Triwulan 2	Capaian Triwulan 2	%
IKM 17.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	71,50			
IKM 18.Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	88,50	88,50	92,10	104,07

2. Dari 5 Sasaran Kegiatan, diperoleh capaian IKU nilai 110-120 sebanyak 7 (Tujuh) IKU dan nilai 90 - < 110 sebanyak 4 (empat) IKU.
3. Dari 11 (sebelas) IKU yang diukur di triwulan 2 tahun 2025, 9 (Sembilan) IKU mencapai target triwulan dan 2 (dua) IKU tidak mencapai target triwulan yaitu IKU Volume Produksi Perikanan tangkap dan IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.

4.2 REKOMENDASI PERBAIKAN

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan di triwulan berikutnya untuk mendorong pencapaian Indikator Kinerja baik yang belum tercapai di triwulan 2 maupun yang akan dilakukan pengukuran capaian di triwulan 3 2025, antara lain:

- 1) Melakukan evaluasi pelayan PNBP yang nilai realisasi masih di bawa target tahunan, salah satunya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas alat transportasi yang pemanfaatannya masih rendah dengan mempromosikan kepada pengguna jasa;
- 2) Meningkatkan volume produksi, melalui koordinasi dengan PSDKP terkait masih adanya kapal perikanan yang mendaratkan ikan di pelabuhan tangkahan serta koordinasi dengan UPI dan pelaku usaha di PPN Ternate untuk dapat membeli semua jenis ikan yang diartakan di PPN ternate
- 3) Mengevaluasi operasional fasilitas yang menggunakan daya Listrik tinggi dalam rangka mendukung efisiensi pemanfaatan Listrik;
- 4) Untuk memaksimalkan pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan terhadap perizinan Sertifikat Kelaikan kapal Perikanan, akan dilakukan penempatan petugas yang telah memiliki Brevet SKKP di beberpaa Pelabuhan Binaan, sehingga jika ada

pemogohan SKKP akan memudahkan dan mempercepat proses pengurusan dokumen SKKP;

- 5) Berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan terkait pendataan Surat Keterangan Kesehatan yang telah dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan pengurusan SPB;
- 6) Menugaskan Pegawai untuk mengikuti Diklat 20 JP, dalam rangka peningkatan IP ASN yang belum memenuhi target tahun 2025;
- 7) Untuk meningkatkan pemenuhan dokumen WBK, akan dilakukan Upaya percepatan dengan melakukan pemenuhan dokumen di setiap area pengungkit secara berkala.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kamarudin**
Jabatan : **Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Lotharia Latif**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

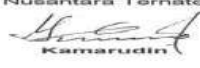
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate


Kamarudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Rp. Juta)	2.294,76
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat	2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Ton)	4.000
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	100
		4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	87
		5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara (persen)	55
		6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Perikanan Nusantara Ternate (persen)	80
		7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	30,10
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perangkap ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	368
		9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
Program Dukungan Manajemen			
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	10. Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Telah Dinilai WBK (Nilai)	75,5
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	85
		12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	88
		13. Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	87
		14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	76

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	81
		16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	92
		17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	71,5
		18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	88,5

Data Anggaran:

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Rp. 1.127.701.000
Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Rp. 33.460.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Dijen Perikanan Tangkap	Rp. 11.483.975.000
Total Anggaran PPN Ternate Tahun 2025	Rp. 12.855.136.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate


Kamarudin



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KESELAMATAN
MENUJU ZERO ACC

KKP 2025

pengambiran 08

PPN Ternate terima penghargaan

Kampanye Keselamatan Pelayaran

dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

PPN Ternate

PPN Ternate

MAJANG

Melayan Anti Korupsi, Kaya Adanya Prestasi Baru

BerAKHLAK

BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Raih Predikat

ISTIMEWA

atas Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

